

Rekonstruksi Identitas Politik melalui Praktik Kekuasaan dalam Film *Hit Me Anyone One More Time* (2019)

Vina Rahmawati¹, Lukmanul Hakim²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Email: ¹*2210631180112@student.unsika.ac.id, ²lukmanul.hakim@staff.unsika.ac.id

Abstrak

Kajian ini menganalisis rekonstruksi identitas politik dalam film *Hit Me Anyone One More Time* (2019) melalui sistem signifikasi dua tingkat Roland Barthes dengan perspektif dramaturgi Erving Goffman sebagai mekanisme triangulasi teoretis. Berbeda dari dominasi kajian semiotika film politik yang berpusat pada kampanye elektoral, penelitian ini berfokus pada proses pembentukan kembali identitas politik di lingkungan birokrasi pasca-pemilihan. Pendekatan kualitatif konstruktivisme diterapkan melalui observasi tak berperan dan dokumentasi adegan film. Data dianalisis melalui pemetaan makna denotatif, penafsiran konotatif, dan identifikasi mitos untuk menelusuri bagaimana identitas politik direpresentasikan dan dimaknai dalam narasi film. Temuan dari kajian ini menghasilkan bahwa rekonstruksi identitas politik direpresentasikan sebagai proses bertahap; berawal dari perubahan perilaku dalam kehidupan sehari-hari, berkembang melalui interaksi sosial yang berulang, lalu memperoleh legitimasi melalui pengakuan publik. Identitas baru Kuroda dibangun melalui representasi sikap yang lebih humanis, aksesibel, dan responsif terhadap masyarakat, yang kemudian membentuk persepsi baru atas dirinya sebagai pemimpin. Relasi antara panggung belakang dan panggung depan menjadi mekanisme utama yang menghubungkan perubahan personal dengan penerimaan publik atas identitas tersebut. Pada saat yang sama, film ini mereproduksi mitos mengenai kewajaran elitisme birokrasi, sentralisasi figur pemimpin, supremasi institusi eksekutif, serta manipulasi fakta sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pemerintahan. Temuan ini mengindikasikan bahwa identitas politik direpresentasikan sebagai konstruksi yang terus dibentuk melalui tindakan, relasi sosial, dan proses pemaknaan publik. Secara teoretis, kajian ini memperluas pembahasan semiotika politik mengenai rekonstruksi identitas politik setelah seorang aktor berada dalam struktur kekuasaan. Secara praktis berupaya mendorong literasi media yang lebih kritis dalam memahami representasi figur kenegaraan dalam media populer.

Kata Kunci: Dramaturgi Goffman, Identitas Politik, Konstruktivisme, Satire, Semiotika Barthes.

Abstract

This study analyzes the reconstruction of political identity in *Hit Me Anyone One More Time* (2019) using Roland Barthes's two-level signification system and Erving Goffman's dramaturgical perspective as theoretical triangulation. Departing from traditional political film semiotics focused on electoral campaigns, this research examines the reshaping of political identity within a post-election bureaucratic environment. A qualitative constructivist approach is applied through non-participant observation and film scene documentation. Data are analyzed by mapping denotative meanings, interpreting connotations, and identifying myths to trace how political identity is represented and interpreted. The findings reveal that political identity reconstruction is represented as a gradual process; originating from daily behavioral changes, developing through repeated social interactions, and gaining legitimacy via public recognition. Kuroda's new identity is built on a more humanistic, accessible, and responsive attitude, reshaping public perception of his leadership. The front-stage and back-stage dynamics serve as the primary mechanism linking personal change to public acceptance. Concurrently, the film reproduces myths concerning the naturalness of bureaucratic elitism, leader centralization, executive supremacy, and fact manipulation to maintain governmental stability. These findings indicate that political identity is a continuous construction shaped by actions, social relations, and public interpretation. Theoretically, this study extends political semiotics by analyzing identity reconstruction once an actor is embedded in power structures. Practically, it fosters critical media literacy regarding the representation of state figures in popular media.

Keywords: Barthes's Semiotics, Constructivism, Goffman's Dramaturgy, Political Identity, Satire.

PENDAHULUAN

Sebagai media komunikasi, film mengorganisasi berbagai tanda dalam membangun narasi yang merepresentasikan kondisi atau isu sosial tertentu (Wahyuningsih, 2019) dan berkapasitas untuk membentuk persepsi penonton terhadap materi yang terkandung di dalamnya (Kashaka, 2025). Hal tersebut juga didukung dengan berkembangnya industri sinema yang memiliki keragaman muatan yang direpresentasikan melalui berbagai jenis dan genre, serta menjadi sarana bagi kreator dalam menyajikan gagasan tertentu dari karya audiovisualnya (Gayratovna, 2025).

Dalam kajian ini, film bertajuk *Hit Me Anyone One More Time* (2019) mengusung genre drama dan komedi sebagai struktur utama penceritaan, di mana karakteristiknya terasa dekat serta familier bagi audiens, karena genre tersebut umumnya ditujukan untuk menghadirkan cerminan interaksi sosial yang menyerupai realitas (Gayratovna, 2025). Mengikuti alurnya, film ini juga mengerucut dengan membawa subgenre satire politik yang memanfaatkan humor, ironi, dan karikatur dalam memberikan kritik tajam terhadap urusan kenegaraan dan perilaku figur otoritas di dalamnya (Boukes et al., 2024). Melalui bingkai satire politik tersebut, film ini menggambarkan bagaimana situasi darurat personal yang dialami oleh tokoh utama dikonversikan menjadi instrumen untuk merombak perilaku aktor negara.

Tinjauan terhadap kajian-kajian semiotika terdahulu tentang film yang bertema politik menunjukkan kecenderungan latar pada ranah elektoral atau fase pra-pemilihan yang berkaitan dengan pengelolaan tanda dan citra untuk memenangkan kompetisi kekuasaan. Misalnya, kajian terhadap film *Our Brand Is Crisis* (2015) oleh Afnira (2023) yang berfokus pada bagaimana simbol, iklan, dan strategi komunikasi politik dioperasikan oleh konsultan politik demi mendongkrak elektabilitas figur kandidat. Adapun Anisa dan Rifa'i (2024) menganalisis film *Kejarlah Janji* (2023) yang mengidentifikasi tanda-tanda visual yang mengonstruksikan pesan moral, ketertiban administrasi, serta edukasi anti-politik uang kepada masyarakat pemilih.

Sementara itu, film ini membawa dimensi yang berbeda, yakni mengenai birokrasi pasca-pemilihan, yang secara spesifik terdapat peralihan fungsi pengelolaan tanda yang berkaitan dengan bagaimana pengelolaan performa yang tidak biasa mampu memengaruhi arah kepemimpinan nasional, serta bagaimana sandiwara politik terjadi di dalam lingkaran elite kekuasaan. Urgensi kajian terhadap ranah pasca-pemilihan berangkat dari fenomena birokrasi kontemporer yang tentu bekerja melalui kebijakan, namun sekaligus melalui produksi simbol, citra, dan performa yang membentuk persepsi publik, mengingat perkembangan media telah mendorong meningkatnya peran komunikasi visual dalam politik, sehingga citra dan representasi figur politik menjadi bagian yang semakin penting dalam proses komunikasi politik kontemporer (Farkas & Bene, 2021). Di mana ketika capaian substantif sulit diwujudkan, maka bahasa, simbol, dan gestur sering kali dimanfaatkan untuk membangun kesan tata kelola yang baik sebagai bagian dari praktik tata kelola performatif (*performative governance*) (Ding, 2020). Pada saat yang sama, proses politik pasca-pemilihan juga berlangsung dalam ruang yang relatif tertutup sehingga sulit diakses oleh masyarakat. Kondisi tersebut menjadikan film satire politik sebagai ruang representasi yang mendukung berbagai dinamika kekuasaan, negosiasi elite, dan pengelolaan citra birokrasi divisualisasikan melalui ironi dan dramatisasi (Boukes et al., 2024). Di tengah meningkatnya sinisme publik terhadap politik (Schindler, 2024), pembacaan semiotik berupaya menelaah apakah representasi tersebut benar-benar membongkar mitos kekuasaan atau bahkan mereproduksinya dalam bentuk yang lebih dapat diterima?

Kajian ini hadir sebagai perspektif alternatif yang melengkapi literatur yang telah ada, dengan berfokus pada cara seorang penguasa menata ulang identitas manajerialnya dari dalam birokrasi tertutup. Atas hal itu, melalui analisis semiotika, audiovisual yang memuat deretan gambar dan suara tersebut dapat diterjemahkan guna menemukan gagasan tersembunyi dari para kreatornya (Bakhtiyorovna, 2025), dengan tujuan untuk mengidentifikasi bagaimana identitas politik karakter utama direkonstruksi melalui negosiasi internal, pembentukan karakter, dan pengelolaan persona.

Secara naratif, film ini mengonstruksikan disrupsi kekuasaan melalui transformasi kepemimpinan Perdana Menteri Keisuke Kuroda yang tengah mengalami krisis legitimasi dengan tingkat kepercayaan publik sebesar 2,3%. Sebelum krisis ini terjadi, figur Kuroda direpresentasikan sebagai penguasa hegemonik yang arogan, egois, kerap mengingkari janji politik, serta bertindak diskriminatif terhadap kaum perempuan. Hingga momentum transformasi identitasnya terjadi ketika tokoh masyarakat melemparkan batu ke arah kepala Kuroda yang menyebabkan amnesia. Dalam merespons kondisi tersebut, jajaran sekretariat melakukan strategi manipulasi kesan awal dengan berupaya menyembunyikan kondisi medis sang pejabat demi mengamankan stabilitas kabinet. Hilangnya ingatan Kuroda menjadi titik balik baginya untuk berperilaku humanis dan aksesibel, mengevaluasi keputusan lamanya, serta mempelajari kembali ilmu-ilmu sosial dan tata kelola pemerintahan. Melalui proses tersebut, manifestasi transformasi identitasnya juga

terwujud ketika Kuroda membuat sejumlah keputusan administratif yang merevisi kebijakan-kebijakan sebelumnya, termasuk penghapusan proyek pembangunan infrastruktur parlemen yang dipenuhi praktik gratifikasi, yang secara semiotik membongkar tanda-tanda oligarki di internal eksekutif.

Meskipun pada tahap lain ingatannya telah kembali, di fase ini, alur satire politik bergeser menjadi sebuah strategi agensi rasional; Kuroda secara sadar memilih menolak identitas lamanya dan mempertahankan konstruksi identitas baru tersebut. Ia memilih tetap bersandiwara di balik status amnesia, sebuah tindakan yang dalam perspektif dramaturgi Erving Goffman dapat dibaca sebagai pemanfaatan panggung depan (*front stage*) guna mengoptimalkan manajemen kesan (*impression management*) (Kennedy et al., 2026). Goffman memandang interaksi keseharian manusia selayaknya sebuah pementasan teatral, di mana setiap aktor berupaya mengendalikan kesan ataupun transmisi informasi demi merawat citra diri dan mengarahkan penilaian orang lain (Nunes, 2021). Keputusan Kuroda dalam memanipulasi ruang panggung tersebut berakar pada usahanya menghindari keruntuhan atau kegagalan identitas politik masa lalunya di mata publik (Koury, 2019). Kuroda menjalankannya sebagai instrumen untuk mereduksi resistensi politik dari lawan-lawannya, mengecoh kewaspadaan aparatus negara yang korup, dan menjadi strategi rasional utama baginya dalam memperbaiki birokrasi serta mereformasi integritas eksekutif melalui pembenahan internal kekuasaan.

Kerangka analisis semiotika struktural Roland Barthes memfasilitasi instrumen yang kuat untuk mengungkap mekanisme produksi tanda di balik sandiwara figur eksekutif tersebut, yang bekerja melalui pemisahan antara aspek fisik dengan lapisan makna kultural yang tersembunyi di baliknya. Melalui penguraian bertahap, kajian ini berupaya melacak bagaimana sebuah kepentingan ideologis dikemas sedemikian rupa agar diterima dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar oleh publik.

Studi ini membatasi kajian pada interpretasi sistem tanda yang termuat dalam adegan-adegan inti film, di mana fokusnya dibatasi pada bagaimana identitas politik Kuroda direkonstruksi melalui negosiasi internal, pembentukan karakter, dan pengelolaan persona di lingkup eksekutif; sehingga studi ini bukan menganalisis sisi sinematografi murni pada film terkait, seperti teknik pencahayaan dan pergerakan kamera, ataupun menganalisis aspek klinis dari kondisi amnesia yang dialami sang pejabat. Akhir dari kajian ini ditujukan pada penguraian tatanan simbolik mengenai proses rekonstruksi identitas politik yang dioperasikan melalui mekanisme dramaturgi karakter utama film *Hit Me Anyone One More Time* (2019). Dan analisisnya ditujukan untuk mengurai interaksi tanda visual dan tekstual (dialog) yang digunakan dalam pengelolaan performa aktor negara demi meluncurkan agenda pembersihan birokrasi.

METODE

Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif konstruktivisme dengan metode semiotika. Model analisis semiotika Roland Barthes digunakan untuk mengidentifikasi tatanan pertandaan (*orders of signification*) (Saputra & Saifuddin, 2022), di mana model ini mendukung pembacaan bertahap terhadap elemen visual dan linguistik guna mengungkap makna ideologis yang tersembunyi (Bakhtiyorovna, 2025; Barus et al., 2025). Kajian ini juga diintegrasikan dengan perspektif dramaturgi Erving Goffman guna menganalisis negosiasi internal dan pengelolaan kesan (*impression management*) karakter utama di panggung eksekutif (Kennedy et al., 2026).

Data primer dalam kajian ini ialah dokumen audiovisual berupa film asal Jepang yang bertajuk *Hit Me Anyone One More Time* (2019), karya sutradara Kōki Mitani, yang diproduksi atas kolaborasi antara Fuji Television Network dan Toho. Pengumpulan data ditelusuri melalui teknik observasi tak berperan dan dokumentasi. Proses tersebut berjalan dengan menyimak tayangan berulang kali untuk mengidentifikasi dan merekam adegan spesifik yang memuat transformasi perilaku karakter utama pascainsiden amnesia. Sementara dokumentasi dilakukan terhadap adegan-adegan inti melalui pengambilan tangkapan layar sebagai representasi visual dan penyalinan takarir (*subtitle*) sebagai representasi linguistik. Langkah perekaman tanda-tanda audiovisual tersebut menjadikan data statis lebih terukur saat dianalisis (Saputra & Saifuddin, 2022).

Pemilihan adegan dilakukan secara bertujuan (*purposive*) berdasarkan tiga kriteria yang ditetapkan sebelum proses observasi berlangsung, yakni adegan yang memuat perubahan perilaku Kuroda yang tampak secara visual dan terdokumentasi dalam dialog, adegan yang merepresentasikan setidaknya satu dari tiga tema analitik (negosiasi internal, pembentukan karakter, atau pengelolaan persona di lingkup eksekutif), serta adegan yang disusun secara kronologis di dalam masing-masing tema. Karena pengklasifikasian dilakukan berdasarkan tema analitik tersebut, satu rentang waktu film dapat muncul dalam lebih dari satu tema apabila adegan yang bersangkutan memuat muatan semiotik yang relevan dengan dua tema sekaligus, sehingga distribusi sampel dirancang untuk memastikan setiap tema terwakili oleh lintasan perubahan yang dapat ditelusuri secara analitis dan bukan untuk merepresentasikan fase-fase naratif secara merata (Baghiz & Pujiyanto, 2024; Kotan, 2025).

Proses analisis data mengaplikasikan sistem signifikasi dua tingkat milik Barthes (Barus et al., 2025), yang diintegrasikan dengan perspektif dramaturgi Goffman sebagai mekanisme triangulasi teoretis (Koury, 2019; Lubis & Hidayat, 2026; Tang & Li, 2024). Tahap ini diawali dengan memetakan makna denotasi guna mendeskripsikan tampilan fisik adegan, gestur karakter, dan tuturan secara objektif tanpa interpretasi lanjutan (Afnira, 2023). Pada tahap ini, makna dibentuk melalui hubungan antara penanda (*signifier*) yang tampak dengan petanda (*signified*) yang langsung dipahami dari tanda tersebut; hubungan keduanya menghasilkan tanda denotatif yang merepresentasikan realitas (Wahyuningsih, 2019). Kemudian, penelaahan masuk pada pencarian makna konotasi yang mengaitkan tanda-tanda tersebut dengan etika birokrasi dan tata nilai sosial pemerintahan; karena pada tahap ini, tanda denotatif berkembang menjadi penanda konotatif yang memunculkan makna tambahan berdasarkan konteks budaya, ideologi, pengalaman sosial, serta konstruksi nilai tertentu (Saputra & Saifuddin, 2022). Akumulasi dari pemaknaan konotatif tersebut selanjutnya disintesis untuk mengidentifikasi keberadaan mitos, yang dipahami sebagai sistem pemaknaan tingkat lanjut yang membuat nilai-nilai ideologis tertentu tampak alamiah, wajar, dan diterima sebagai kebenaran sosial (Wahyuningsih, 2019). Pada ranah konotasi dan mitos inilah gagasan dramaturgi Goffman turut difungsikan. Mitos yang ditemukan dievaluasi sebagai wujud tata kelola kesan (*impression management*) sang politikus saat merakit identitas barunya.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi teoretis, di mana setiap tanda baru diterima sebagai temuan apabila maknanya dapat dipertahankan dalam pembacaan lintas kerangka Barthes dan Goffman (Tang & Li, 2024). Teknik semiotika Barthes membantu kajian ini untuk membaca *apa* yang ditandai oleh elemen visual dan verbal di dalam film, sementara perspektif Goffman membantu menjelaskan *mengapa* dan *dalam kondisi sosial apa* tanda-tanda tersebut diproduksi. Rangkaian pemaknaan tanda tersebut selanjutnya dipadukan untuk memberikan uraian yang jelas mengenai strategi penataan ulang birokrasi yang beroperasi di balik cerita fiksi satire politik tersebut.

Transparansi prosedural turut dijaga dengan mendokumentasikan seluruh tahapan pemaknaan secara eksplisit sehingga jejak analitis dapat ditelusuri untuk mengevaluasi konsistensi penafsiran (Bednarek et al., 2024; Daniel et al., 2024). Subjektivitas yang melekat pada analisis semiotika kualitatif diakui sebagai karakteristik inheren dari pendekatan ini, namun dikelola melalui penggunaan konsep teoretis dan akuntabilitas narasi analitik yang menyertakan justifikasi atas setiap interpretasi yang diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan observasi visual ini diklasifikasikan ke dalam tiga bagian tema spesifik, yakni negosiasi internal, pembentukan karakter, dan pengelolaan persona, agar kejanggalan tata laku sang pejabat, pergeseran arah kebijakan, serta strategi pemeliharaan wibawanya dapat diuraikan secara terstruktur. Pemaknaan atas realitas politik pada institusi eksekutif Kuroda digali melalui analisis semiotika yang diintegrasikan bersama perspektif dramaturgi. Representasi visual dari figur pemerintahan diidentifikasi ke dalam tahapan pemaknaan denotatif, konotatif, dan mitos. Pengoperasian panggung kekuasaan beserta rutinitas pengelolaan kesan diamati secara saksama guna membongkar tatanan ideologi yang dinormalisasi di balik performa birokrasinya.

Negosiasi Internal dan Identifikasi Ulang Identitas Politik

Proses rekonstruksi identitas umumnya diawali dari ruang intrapersonal yang samar, yang ditandai dengan konflik batin seseorang dalam menjawab esensi dirinya saat ini dan sosok seperti apa yang ia tuju di masa mendatang (Şahin et al., 2026; Zen et al., 2023). Dalam perspektif Goffman, proses ini terjadi sepenuhnya di panggung belakang (*backstage*), yakni ruang di mana tidak ada audiens, pertunjukan, ataupun tekanan untuk menampilkan persona tertentu (Kennedy et al., 2026). Pada film ini, sang perdana menteri, Kuroda, mengalami gejala ini secara intens dalam kondisi amnesia; ia kehilangan referensi identitas lamanya dan konflik batin tersebut terjadi dalam kondisi yang dipaksakan, sehingga kekosongan inilah yang menjadi proses rekonstruksi identitas dimulai.



Gambar 1. Kuroda menyaksikan pemberitaan tentang dirinya dengan penuh kebingungan di sebuah kedai makan (menit 03:07)

Secara visual, terlihat pada Gambar 1, Kuroda terduduk di kedai makan kecil dengan mengenakan piyama rumah sakit berwarna terang dan kepala berbalut perban, sementara para pengunjung di sekitarnya terdiam dan menatap dengan ekspresi bingung dan curiga. Pemandangan tersebut diinterpretasikan sebagai gabungan ranah pribadi (*backsatge*) ke dalam ranah representasi politik (*front stage*), di mana keberadaan figur pemerintah di fasilitas publik direpresentasikan sebagai keterpisahan tokoh politik dari fasilitas negara yang biasa melindunginya. Tatapan para pengunjung kedai dipahami sebagai bentuk ketidakpercayaan warga negara terhadap rekam jejak pemimpin tersebut, yang menggambarkan ancaman hilangnya muka (*loss of face*) pada interaksi sosial (Miles et al., 2020). Siaran televisi mengenai berita politik juga mendukung situasi ini sebagai pengingat akan citra buruk sang birokrat di masa lalu, sekaligus mengonfirmasi identitas yang rusak (*spoiled identity*) dengan tereksposnya kegagalan performa tata kelola (Smith & Sprung, 2026). Melalui pemaknaan tersebut, mitos elitisme politik teridentifikasi berupa kedudukan eksklusif para pejabat negara diyakini sebagai sebuah kelaziman operasional pemerintahan (Damele & Campos, 2022); ketika tokoh birokrat berinteraksi di ruang sosial masyarakat dengan identitas yang berbeda, kecurigaan diproduksi secara alamiah sebagai respons audiens, di mana hal ini menggambarkan bagaimana jarak sosial antara pejabat dan rakyat biasa selama ini dianggap sebagai hal yang lumrah dalam aturan main bernegara. Paparan berulang terhadap representasi semacam ini berpotensi memperkuat anggapan bahwa jarak sosial antara pejabat dan rakyat merupakan konsekuensi yang lumrah dari posisi kekuasaan. Akibatnya, relasi yang bersifat hierarkis dapat lebih mudah diterima sebagai bagian dari tatanan politik yang sewajarnya.



Gambar 2. Reaksi keterkejutan sekretaris Isaka melalui larangan penggunaan bahasa sopan akibat perubahan drastis perilaku Kuroda dari watak sebelumnya (menit 06:50)

Berlanjut pada Gambar 2, Kuroda terduduk di kursi kerja besar di dalam ruang kerja klasik bertabur rak buku dengan mengenakan piyama tidur bermotif; berinteraksi dengan sekretaris Isaka yang mengenakan jas formal hitam dan melontarkan larangan berbahasa sopan karena keterkejutannya akan tutur kata santun dari sang pejabat, hal ini direpresentasikan sebagai reaksi spontan terhadap kebiasaan komunikasi Kuroda yang berubah. Teguran bernada sarkastis tersebut mengerucut pada pemahaman bahwa kesantunan berbahasa dari seorang birokrat yang berbeda dari sebelumnya dievaluasi sebagai sebuah keganjilan pada rutinitas pengelolaan kesan (*impression management*). Konstruksi makna tersebut mengarah pada mitos bahwa sikap berjarak, keras, dan sulit dijangkau merupakan karakter yang lazim melekat pada figur pemegang kekuasaan (Pizzolitto et al., 2023). Dalam kerangka ini, perubahan perilaku Kuroda diperlakukan sebagai sesuatu yang tidak biasa, karena lingkungan sekitarnya telah terbiasa mengaitkan posisi kepemimpinan dengan pola interaksi yang hierarkis, sehingga kemunculan sikap yang lebih hangat dan empatik dari seorang pemimpin diperlakukan sebagai sesuatu yang tidak lazim oleh lingkungan di sekitarnya (Noordzij et al., 2024). Kondisi tersebut turut menaturalisasi anggapan bahwa karakter yang elitis dan berjarak merupakan bagian yang pantas dari perilaku seorang pejabat negara.



Gambar 3. Kuroda menatap koper berisi dana gratifikasi proyek A2 dengan ekspresi tidak percaya dan menyebutnya sebagai keuntungan yang tidak benar (menit 34:20)

Pada Gambar 3, sebuah adegan di ruang kantor bernuansa formal ketika Sekretaris Mansaku membuka koper perak metalik berisi tumpukan uang tunai gratifikasi proyek A2 (pembangunan gedung parlemen kedua dengan fasilitas mewah), sementara Kuroda berdiri di dekatnya mengenakan setelan jas formal hitam dengan raut wajah kebingungan seraya menyebutnya sebagai keuntungan haram. Susunan adegan tersebut

dipahami sebagai bentuk dari wujud perolehan gratifikasi yang dikelola pada ranah rahasia (*backstage*) birokrasi. Ekspresi kebingungan atas keberadaan dana tersebut diartikan sebagai penolakan terhadap penyimpangan wewenang yang dibiarkan oleh tim politiknya. Pernyataan mengenai perolehan dana secara ilegal direpresentasikan sebagai awal mula perbaikan moral Kuroda. Tumpukan uang tersebut dipahami sebagai lambang kejatuhan integritas instansi negara, sekaligus praktik rahasia kotor (*dirty work*); adegan ini berkaitan dengan kewajaran korupsi birokrasi yang digambarkan melalui keberadaan koper tersebut (Jayakody et al., 2023). Penerimaan dana gratifikasi dalam proses birokrasi diyakini sebagai kelaziman sistemik operasional kenegaraan dan diterima secara alamiah oleh jajaran aparatur sebagai pelicin roda administrasi (Nur-tegin & Jakee, 2020). Timbulnya kesadaran etis untuk mempertanyakan aliran uang ilegal itu dikonstruksikan sebagai sebuah anomali struktural di lingkungan pemerintahan. Representasi semacam ini penting dicermati karena berpotensi menaturalisasi pemahaman bahwa praktik-praktik yang menyimpang dari prinsip etika birokrasi merupakan bagian yang lumrah; ketika makna tersebut diterima sebagai sesuatu yang wajar, perhatian audiens dapat bergeser dari persoalan struktural yang melatarbelakangnya menuju penerimaan atas praktik tersebut sebagai bagian dari realitas birokrasi.



Gambar 4. Kuroda meminta sekretaris Banba merahasiakan pengakuannya tentang kondisi amnesia yang sesungguhnya (menit 2:02:07)

Ditampilkan pada Gambar 4, Kuroda berada di dalam ruangan mewah berdesain klasik, mengenakan setelan jas formal biru bergaris rapi lengkap dengan pin parlemen, memegang selembar kertas putih di hadapan sekretaris Banba dan menyebut kondisinya sebagai rahasia negara. Realitas tersebut direpresentasikan sebagai bentuk penyalahgunaan nomenklatur keamanan nasional demi mengamankan jabatan personal. Pakaian formal di ruangan mewah dimaknai sebagai usaha untuk membingkai kelemahan kognitif menggunakan sisa wibawa di area publik (*front stage*). Praktik penutupan fakta ingatan tersebut dipahami sebagai wujud pengendalian informasi, di mana sebuah tim berkolusi menyembunyikan kelemahan dari jangkauan audiens agar legitimasi pementasan politik terus dipertahankan. Pemeliharaan wibawa mengerucut pada mitos supremasi institusi eksekutif yang dipelihara melalui kesepakatan kerahasiaan tersebut (Sullivan, 2023). Kelemahan memori sang pemimpin dikemas menggunakan nomenklatur keamanan nasional agar operasional pemerintahan terus berjalan. Manipulasi data dinilai sebagai langkah yang wajar untuk memitigasi keruntuhan reputasi di hadapan masyarakat (Kennedy et al., 2026). Praktik penutupan fakta tersebut dipercayai sebagai prosedur administratif demi menjaga keberlangsungan tindakan aparatur negara dari ancaman desakan audiens (Fan & Christensen, 2024).

Rangkaian temuan pada sub-bab ini mengafirmasi premis dramaturgi Goffman mengenai pemisahan antara ruang privat dan ruang publik dalam pembentukan identitas. Pada kasus Kuroda, relasi antara panggung depan (*backstage*) dan (*front stage*) terbaca secara jelas; ketika kondisi amnesia menempatkan sang pejabat dalam ruang tanpa referensi identitas lama, dan dari kekosongan itulah respons-respons spontannya di hadapan publik terbentuk. Dari sisi mitos, meskipun respons audiens terhadap pesan media tetap dapat beragam (Kashaka, 2025), konstruksi jarak sosial antara pejabat dan rakyat yang teridentifikasi pada sub-bab ini dapat berkontribusi pada penerimaan relasi yang hierarkis sebagai sesuatu yang wajar. Paparan berulang terhadap representasi semacam ini berpotensi membentuk pemahaman bahwa eksklusivitas elite merupakan bagian yang lumrah dari tatanan sosial-politik (Damele & Campos, 2022), sehingga ruang untuk mempertanyakan relasi kuasa tersebut menjadi relatif terbatas.

Rekonstruksi Karakter Melalui Pilihan dan Keputusan Kebijakan

Pembentukan karakter menjadi tahap di mana hasil dari negosiasi internal individu mulai memandu tindakan (Nunes, 2021). Berbeda dengan pengelolaan persona yang ditujukan untuk memengaruhi atau bahkan memanipulasi penilaian publik, tahap ini tidak dirancang untuk memikat audiens sosial. Dalam perspektif Goffman, keputusan-keputusan yang diambil pada tahap ini terjadi di panggung belakang (*backstage*) (Kennedy et al., 2026). Pada film ini, Kuroda sendiri sering kali tidak menyadari bahwa ia sedang merekonstruksi atau membangun jati diri yang baru melalui pilihan-pilihannya. Meskipun lahir dari dorongan internal di panggung belakang (*backstage*), tindakan ini memiliki resonansi kuat, dan

konsekuensinya juga tetap akan terbaca di panggung depan (*front stage*) (Kennedy et al., 2026; Koury, 2019). Hal inilah yang membuat rekonstruksi identitasnya lebih mendalam, karena transformasi perilakunya mengubah bagaimana prinsip dasarnya dalam mengambil keputusan.



Gambar 5. Kuroda membantu seorang wartawan perempuan yang terjatuh di hadapannya (menit 19:50)

Pada Gambar 5, di area publik gedung pemerintahan yang dipadati wartawan, staf, dan fotografer, seorang wartawan perempuan terduduk di lantai setelah terjatuh, lalu Kuroda membungkuk mengulurkan tangan membantunya berdiri seraya bertanya keadaannya, sementara jajaran pegawai tampak terkejut. Tindakan fisik tersebut diinterpretasikan sebagai ketiadaan batasan struktural di ranah publik (*front stage*); di mana uluran tangan dari seorang pejabat kepada warga sipil ini menunjukkan perubahan sikap dari gaya yang sebelumnya kaku menjadi penuh kepedulian. Diiringi dengan keterkejutan jajaran pegawai yang dipahami karena adanya perubahan mendadak atas inkonsistensi pengelolaan kesan yang dimiliki Kuroda di masa lalu. Perhatian personal yang diberikan di tengah kerumunan media tersebut juga dimaknai sebagai upaya perbaikan identitas sosial melalui interaksi tatap muka secara langsung (Pritzlaff-Scheele & Nullmeier, 2018). Dari sisi mitos, ketidakpedulian pejabat tinggi terhadap insiden di sekitarnya diyakini sebagai kelaziman protokoler dengan tingginya jarak sosial yang ditampilkan (Ortiz-Inostroza & Bargsted, 2026).



Gambar 6. Kuroda menyampaikan permintaan maaf dan rasa terima kasih secara langsung kepada pekerja konstruksi yang melemparkan batu ke arah kepalanya (menit 49:55)

Pada bagian lain, melalui Gambar 6 ditampilkan Kuroda berdiri mengenakan setelan jas formal di dalam ruangan mewah dengan raut wajah tulus bersalah, berhadapan dengan pekerja konstruksi berekspresi curiga, lalu sang birokrat menyampaikan rasa terima kasih secara langsung. Susunan adegan tersebut dipahami sebagai bentuk perbaikan identitas yang sebelumnya buruk (*spoiled identity*) melalui konfrontasi langsung dengan korban kebijakannya di masa lalu. Pertemuan pejabat tinggi dengan pelaku penyerangan di ruang formal direpresentasikan sebagai dekonstruksi eksklusivitas pemerintahan (*front stage*), sementara ekspresi curiga sang pekerja diterjemahkan sebagai sisa ketidakpercayaan publik akibat rekam jejak arogansi yang membekas pada tokoh di hadapannya. Permintaan maaf dan terima kasih dari pemegang kekuasaan dapat dimaknai sebagai pengorbanan wibawa demi memulihkan interaksi sosial yang sempat hancur (Reinders et al., 2021), di dalam hal ini mitosnya teridentifikasi sebagai ketidaklaziman dalam hierarki sosial, karena ketertundukan pejabat di hadapan rakyat sipil dikonstruksikan sebagai peristiwa yang langka (Ding, 2020).



Gambar 7. Kuroda meminta pelayan restoran untuk tidak memberikan perlakuan khusus dalam jamuan makan malam pribadi (menit 59:10)

Ditampilkan pada Gambar 7, sebuah realitas mengenai suasana jamuan makan malam privat keluarga di restoran mewah, di mana Kuroda merespons dua pelayan berseragam resmi dengan meminta agar tidak diberikan perlakuan khusus, yang dimaknai sebagai upaya penarikan batas antara peran politik (*front stage*) dan kehidupan personal (*backstage*). Dan penolakan atas pelayanan istimewa juga direpresentasikan sebagai pelepasan privilese yang melekat pada identitas kekuasaan. Sikap yang memosisikan diri sebagai warga sipil biasa dapat diterjemahkan sebagai bentuk resistensi terhadap rutinitas pengelolaan kesan (*impression management*) elitis yang memanjakan pejabat negara di ranah komersial. Praktik tersebut dinaturalisasi oleh mitos perlakuan istimewa bagi kaum elite, yakni ketika penerimaan fasilitas istimewa oleh aparatur negara di ruang publik diyakini sebagai hak bawaan jabatan yang wajar (Bhugra & Ventriglio, 2024). Sisi lainnya berupa penolakan itu sendiri, yang dievaluasi sebagai sebuah kegagalan oleh para pelaku industri jasa, karena terbiasa melayani arogansi kelas atas (Allesant, 2025).



Gambar 8. Kuroda menyatakan bahwa proyek A2 harus dibatalkan karena kecurangan (gratifikasi) tidak dapat dibenarkan (menit 1:05:17)

Sebuah adegan pada Gambar 8 menampilkan di dalam mobil yang terparkir di jalanan sepi, Kuroda bersikap tegas menyuarakan bahwa kecurangan tidak dibenarkan, sementara sekretaris Isaka memejamkan mata memegang koper uang dan rekannya melongo kaget. Kabin mobil yang tertutup dapat diinterpretasikan sebagai ranah rahasia (*backstage*) sebagai tempat negosiasi yang dikelola. Penolakan atas dana gratifikasi direpresentasikan sebagai keputusan rantai kolusi yang menopang wibawa kekuasaan Kuroda; hal ini didukung dengan keterkejutan rekan politiknya yang dipahami sebagai bentuk kepanikan atas hilangnya koordinasi tim dan ancaman bagi stabilitas praktik penyimpangan yang telah disepakati di masa lalu. Keyakinan terkait hal tersebut dinormalisasi melalui mitos bahwa kolusi merupakan penyokong stabilitas rezim pemerintahan, di mana patronase yang terjadi menjadi bentuk untuk mempertahankan loyalitas tim politik (Kim et al., 2026), sehingga penolakan terhadap praktik kecurangan biasanya dikonstruksikan sebagai tindakan irasional yang membahayakan keberlangsungan karier elite (Jancsics, 2024).



Gambar 9. Kuroda menyampaikan secara jujur kepada Presiden Amerika Serikat bahwa dirinya tidak dapat menyetujui pengurangan tarif impor demi melindungi para petani dan produksi ceri lokal (menit 1:29:12)

Dalam sebuah jamuan kenegaraan formal, ditampilkan pada Gambar 9, Kuroda mengenakan setelan jas elegan dan bersikap tegas menyampaikan kewajibannya melindungi petani lokal kepada Presiden Amerika Serikat, didampingi siluet staf diplomatik di belakangnya. Terdapat ketegasan politik yang tinggi melalui pembelaan terhadap nasib petani lokal, yang juga dapat direpresentasikan sebagai rekonstruksi wibawa dan pemulihan identitas kepemimpinannya. Penolakan kompromi ekonomi tersebut menjadi bentuk pertahanan muka (*face-saving*) negara di hadapan tekanan entitas asing (Koury, 2019). Melalui pemaknaan ini, mitos inferioritas negara di hadapan adidaya menjadi isu utama, karena penyelarasan strategis dalam negosiasi ekonomi internasional sering dianggap sebagai norma bagi negara-negara sekutu, di mana kompromi ekonomi biasanya ditukar dengan jaminan keamanan (Kudo, 2025).

Temuan pada sub-bab ini mengafirmasi pandangan Goffman bahwa tindakan yang berkembang di panggung belakang (*backstage*) tetap memiliki konsekuensi terhadap identitas yang terbaca di panggung depan (*front stage*). Berbagai keputusan Kuroda, mulai dari relasinya dengan warga, penolakan privilese, hingga sikap terhadap gratifikasi dan kepentingan petani lokal, secara bertahap membentuk pemaknaan

baru atas dirinya sebagai pemimpin. Dari sisi mitos, representasi tersebut memperlihatkan bagaimana arogansi elite, perlakuan istimewa, maupun praktik patronase birokrasi dapat dipersepsikan sebagai sesuatu yang lazim. Pembacaan kritis terhadap representasi tersebut sangat penting agar makna yang diterima audiens meluas pada relasi kuasa yang melatarbelakanginya, yang bukan sekedar berhenti pada kewajaran praktiknya.

Transformasi Perilaku Melalui Pengelolaan Persona dan Deklarasi Publik

Goffman memandang pengelolaan persona sebagai tindakan yang paling terlihat karena sepenuhnya terjadi di panggung depan (*front stage*) (Kennedy et al., 2026); artinya, rekonstruksi dan/atau transformasi identitas seseorang dapat terlihat secara langsung di hadapan audiens dan memang dirancang untuk *pertunjukkan* (Nunes, 2021). Pengelolaan persona juga mengandung arti tentang *oleh siapa* dan *untuk tujuan apa* pengelolaan tersebut dilakukan (Koury, 2019; Nunes, 2021). Pada awal film ini, persona Kuroda cenderung dikelola oleh sekretaris utamanya, Isaka, di mana Kuroda menjadi objek dari strategi pencitraan orang lain. Dan pada akhir film, Kuroda berhasil mengambil alih pengelolaan tersebut serta mendeklarasikan identitas barunya, yang juga menggambarkan pergeseran keagenan.



Gambar 10. Sekretaris Isaka, Banba, dan Mansaku menyusun strategi untuk menutupi kondisi amnesia Kuroda demi menjaga stabilitas kabinet (menit 08:03)

Pada Gambar 10, di dalam ruangan rapat tertutup yang tenang, sekretaris Isaka yang mengenakan setelan jas hitam formal dan kacamata bulat menatap serius ke arah rekan kerjanya seraya menginstruksikan agar kondisi amnesia perdana menteri dijaga sebagai rahasia. Adegan ini diinterpretasikan bagaimana sebuah koordinasi tim pada ranah privat (*backstage*) dalam merancang pertahanan identitas sang pejabat. Upaya pembungkaman informasi direpresentasikan sebagai mekanisme perlindungan kolaboratif agar kelemahan atasannya tidak terekspos ke ruang publik (*front stage*). Di sinilah salah satu titik pengelolaan kesan (*impression management*) demi memastikan legitimasi pemerintahan tidak runtuh akibat kegagalan performa individu (Nunes, 2021). Mitos yang teridentifikasi pada bagian ini berkaitan dengan kebohongan kolektif sebagai prosedur penyelamatan kekuasaan, di mana penutupan fakta dari masyarakat sipil diyakini sebagai sebuah kewajaran demi menjaga stabilitas pemerintahan (Sullivan, 2023).



Gambar 11. Kuroda menyampaikan permohonan maaf atas jejak perilaku dan kebijakannya di masa lalu dalam sebuah konferensi pers yang dirancang sebagai bagian dari strategi merebut simpati rakyat (menit 1:10:26)

Melalui Gambar 11, Kuroda yang berdiri tegak di balik podium utama pada aula konferensi pers formal, di bawah lampu gantung kristal serta diapit dua ajudan, guna menyampaikan permohonan maaf atas tindakannya di masa lalu di hadapan jurnalis dan jajaran kabinet. Secara konotatif, perangkat ini menunjukkan otoritas dan berupaya mengemas keyakinan yang tulus di panggung depan (*front stage*) untuk memulihkan citra politik. Permintaan maaf secara terbuka direpresentasikan sebagai strategi penyelamatan muka (*face-saving*) setelah tereksposnya kegagalan tata kelola (Koury, 2019). Konstruksi makna yang ditemukan pada adegan ini mengidentifikasi mitos tentang ritus permohonan maaf yang berfungsi sebagai strategi penebusan, yakni pengakuan bersalah di ruang publik dievaluasi sebagai sebuah pengorbanan heroik (Kitagawa & Chu, 2021). Permintaan maaf juga diyakini sebagai strategi instan yang absah untuk mengembalikan kepercayaan rakyat (Reinders et al., 2021); melalui pertunjukan penyesalan, mitos pengamanan karier kerap kali melingkupi tindakan ini.



Gambar 12. Presiden Amerika Serikat secara terbuka memuji kejujuran Kuroda dalam forum bersama (menit 1:33:11)

Sebuah konferensi pers bersama di aula kepresidenan pada Gambar 12 terlihat, di mana Presiden AS secara terbuka memuji kejujuran Kuroda yang menolak pengurangan tarif impor, sementara Kuroda mendengarkan dengan khidmat di podium sebelahnya. Interaksi tersebut diinterpretasikan sebagai validasi performa pada area representasi yang tinggi (*front stage*). Pujian dari kepala negara asing direpresentasikan sebagai penguatan atas identitas baru sang birokrat yang berhasil dikelola dengan baik. Pengakuan oleh entitas eksternal tersebut menguatkan citra pemulihan reputasi dan merupakan hasil dari keberhasilan pengelolaan kesan (*impression management*). Hal ini dinaturalisasi oleh mitos tentang hubungan reputasi domestik dan validasi internasional, terlebih pengakuan dari negara adidaya diyakini sebagai legitimasi tinggi atas kinerja kepemimpinan nasional (Fernández-Molina & Casani, 2023); hal ini berkaitan langsung dengan kewajaran dalam tata panggung politik antarnegara.



Gambar 13. Respons Kuroda terhadap isu skandal domestik keluarga sekaligus merupakan bagian dari strategi yang dirancang untuk menarik simpati rakyat (menit 1:54:24)

Terlihat sebuah adegan di ruang sidang parlemen terbuka pada Gambar 13, ketika Kuroda yang mengenakan setelan jas formal menatap kamera dengan mata berkaca-kaca seraya menyampaikan bujukan kepada istrinya untuk merespons skandal domestik keluarga. Susunan adegan tersebut dipahami sebagai bentuk penarikan konflik privat (*backstage*) ke ruang publik (*front stage*) demi mendapatkan simpati. Kesedihan dan permohonan di hadapan parlemen diartikan sebagai strategi pengelolaan kesan yang mengkapitalisasi emosi personal (Zengin, 2024). Pernyataan mengenai kebahagiaan istri dan rakyat direpresentasikan sebagai upaya menyamarkan kegagalan rumah tangga menjadi sebuah retorika dedikasi kenegaraan. Dari sisi mitos, representasi tersebut berkaitan dengan fenomena komodifikasi ranah privat yang diwajibkan demi resolusi krisis politik, yakni melalui dipertontonkannya kehidupan personal pejabat ketika dukungan publik merosot dan hal ini menjadi bagian strategi untuk dalam upaya menunjukkan transparansi emosional dari tokoh itu sendiri (Danielson & Rolandsson, 2020).



Gambar 14. Kuroda menyambut kerumunan warga dan mendeklarasikan dirinya sebagai Keisuke Kuroda yang baru (menit 1:58:38)

Pada Gambar 14, terlihat Kuroda yang berdiri di balkon gedung parlemen memegang mikrofon, didampingi istrinya, sekretaris Isaka, serta dua ajudan pengawal, guna mendeklarasikan dirinya sebagai sosok yang baru. Gambaran ini direpresentasikan sebagai deklarasi identitas diri Kuroda yang dianggap telah terbentuk baru (*front stage*). Kehadiran istri dan tim di belakangnya dimaknai sebagai kekompakan kolaborasi tim untuk menopang satu narasi tunggal di hadapan massa. Deklarasi personal tersebut direpresentasikan

sebagai puncak dari keberhasilan rekonstruksi identitas yang terjadi untuk menjadi sebuah persona kepemimpinan yang dapat diterima kembali. Keyakinan tersebut dinormalisasi melalui mitos bahwa pergantian citra mampu menghapus rekam jejak sistemik di masa lalu; pembaruan deklaratif dan populis diyakini sebagai solusi atas kegagalan operasional birokrasi (Bauer, 2024).

Temuan pada sub-bab ini mengafirmasi konsep pengelolaan kesan (*impression management*) dalam dramaturgi Goffman, di mana identitas politik dibentuk dan dinegosiasikan melalui berbagai pertunjukan yang ditampilkan di hadapan audiens. Permohonan maaf publik, validasi internasional, pemanfaatan isu personal, hingga deklarasi identitas baru menjadi bagian dari proses pengelolaan persona yang memengaruhi cara publik memaknai kepemimpinan Kuroda. Pada saat yang sama, analisis semiotik mengidentifikasi mitos mengenai kewajaran manipulasi fakta, penebusan melalui permohonan maaf, pentingnya validasi eksternal, serta keyakinan bahwa perubahan citra mampu menyelesaikan persoalan yang lebih mendasar. Mitos-mitos tersebut perlu dicermati secara kritis karena berpotensi menggeser perhatian audiens dari persoalan struktural menuju keberhasilan pertunjukan identitas itu sendiri.

KESIMPULAN

Kajian ini menghasilkan pemahaman bahwa identitas politik terus dibentuk melalui tindakan, interaksi sosial, dan pemaknaan publik. Pada kasus Kuroda, legitimasi atas identitas politik yang baru terbentuk secara bertahap melalui berbagai tindakan yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari sebelum memperoleh pengakuan di ruang publik. Dalam proses tersebut, hubungan antara panggung belakang (*backstage*) dan panggung depan (*front stage*) sangat berperan dalam pembentukan identitas, karena tindakan yang berlangsung dalam ruang personal kemudian menjadi dasar bagi cara publik memaknai figur politik yang bersangkutan.

Secara teoretis, kajian ini memperluas penerapan kerangka Barthes-Goffman dalam analisis representasi figur kenegaraan pada medium film satire politik. Perluasan ini membuka ruang bagi pembacaan yang lebih kritis terhadap bagaimana produksi tanda bekerja dalam kondisi birokrasi pasca-pemilihan, di mana pertarungan citra terjadi di dalam lingkaran elite kekuasaan itu sendiri. Secara praktis, kajian ini mengembangkan cara pandang bagi masyarakat untuk mengevaluasi representasi politisi atau figur kenegaraan yang tampak di media dan bukan sekedar melihat tampilan luar ataupun hasil akhir di permukaan, yakni dengan cara menelusuri dari sisi mekanisme produksinya. Hal ini dikarenakan bahwa tanda-tanda yang tampak sebagai bukti transformasi autentik, seperti permohonan maaf terbuka, deklarasi populis, atau komodifikasi kehidupan personal, dapat sekaligus merupakan instrumen pengelolaan kesan yang terstruktur (Kennedy et al., 2026; Kitagawa & Chu, 2021; Danielson & Rolandsson, 2020). Kesadaran atas mekanisme ini berperan penting dalam membangun literasi media yang kritis dengan tidak berhenti pada penerimaan narasi yang tampak di depan, namun juga harus mampu menelusuri lapisan ideologis yang bekerja di baliknya (Boukes et al., 2024; Kashaka, 2025).

Dan sebagai karakteristik inheren dari analisis semiotika struktural, kajian ini berjalan dalam batas-batas yang perlu diakui secara terbuka. Pembacaan tanda difokuskan pada empat belas adegan inti yang mewakili tiga tema analitik, sehingga dimensi sinematografis lain, seperti pilihan musik latar, pergerakan kamera, rancangan warna, hingga aspek klinis amnesia yang dialami sang tokoh tidak masuk dalam cakupan pemaknaan. Medium komedi satire itu sendiri juga merupakan konstruksi fiksi yang mengompres dan mendramatisasi kerumitan tata kelola ke dalam bingkai naratif yang terstruktur. Dengan demikian, interpretasi yang dihasilkan merupakan pembacaan atas realitas yang sudah direpresentasikan, bukan atas realitas birokrasi itu sendiri. Atas dasar karakteristik tersebut, penelitian lanjutan disarankan untuk melibatkan persepsi khalayak nyata melalui pendekatan resepsi atau studi audiens, guna menelusuri sejauh mana mitos-mitos yang teridentifikasi dalam kajian ini benar-benar terinternalisasi oleh penonton, dan bagaimana latar belakang literasi media mereka memengaruhi cara pembacaan tersebut berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Afnira, E. (2023). Mitos dalam Kampanye Politik: Analisis Semiotika Roland Barthes Pada Film *Our Brand is Crisis*. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 9(2), 1–16. <https://doi.org/10.25299/wedana.2023.12594>
- Allesant, A. (2025, September 3). The Customer King: Deconstructing the Myth? *Eurogroup Consulting*. <https://www.eurogroupconsulting.com/en/publications/article/the-customer-king-a-myth-to-be-deconstructed>
- Anisa, S. D., & Rifa'i, M. (2024). Analisis Semiotika Roland Barthes Tentang Makna Pemilu Damai Dalam Film *Kejarlah Janji*. *Brand Communication*, 3(3), 218–229. <https://doi.org/10.70704/bc.v3i3.307>
- Baghiz, G. M., & Pujiyanto, P. (2024). Ideologi Maskulinitas Dalam Film “Ngeri-Ngeri Sedap” Tahun 2022. *MAVIS: Jurnal Desain Komunikasi Visual*, 6(02), 112–125. <https://doi.org/10.32664/mavis.v6i02.1309>

- Bakhtiyorovna, E. D. (2025). Definition of the Term “Film Discourse” and Approaches to Its Study in Modern Linguistics. *American Academic Publisher*, 5(1), 100–104.
- Barus, E., Aisyah, A., Siregar, E. F., & Risnawaty, R. (2025). An Analysis of Roland Barthes’ Semiotic Theory: Focusing on Denotation, Connotation, and Myth. *International Journal of Educational Research Excellence (IJERE)*, 4(2), 355–363. <https://doi.org/10.55299/ijere.v4i2.1438>
- Bauer, M. W. (2024). Public Administration Under Populist Rule: Standing Up Against Democratic Backsliding. *International Journal of Public Administration*, 47(15), 1019–1031. <https://doi.org/10.1080/01900692.2023.2243400>
- Bednarek, M., Schweinberger, M., & Lee, K. K. H. (2024). Corpus-based Discourse Analysis: From Meta-Reflection to Accountability. *Corpus Linguistics and Linguistic Theory*, 20(3), 539–566. <https://doi.org/10.1515/cllt-2023-0104>
- Bhugra, D., & Ventriglio, A. (2024). An Age of Rage, Victimhood and Entitlement. *International Journal of Social Psychiatry*, 70(4), 636–638. <https://doi.org/10.1177/00207640241254704>
- Boukes, M., Droog, E., Brugman, B. C., & Burgers, C. (2024). Political Satire. In *Entertainment Media and Communication* (pp. 273–288). De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110792881-020>
- Damele, G., & Campos, A. S. (2022). Introduction. Elite Theory: Philosophical Challenges. *Topoi*, 41(1), 1–5. <https://doi.org/10.1007/s11245-022-09794-1>
- Daniel, B. K., Asil, M., & Carr, S. (2024). Psychometric Properties of the TACT Framework—Determining Rigor in Qualitative Research. *Frontiers in Research Metrics and Analytics*, 8. <https://doi.org/10.3389/frma.2023.1276446>
- Danielson, M., & Rolandsson, T. (2020). Politicians as Entertainers - A Political Performance of the Personal. *Continuum*, 34(5), 733–748. <https://doi.org/10.1080/10304312.2020.1793911>
- Ding, I. (2020). Performative Governance. *World Politics*, 72(4), 525–556. <https://doi.org/10.1017/S0043887120000131>
- Fan, Z., & Christensen, L. T. (2024). The Dialogic Performativity of Secrecy and Transparency. *Human Relations*, 77(4), 484–504. <https://doi.org/10.1177/00187267221139457>
- Farkas, X., & Bene, M. (2021). Images, Politicians, and Social Media: Patterns and Effects of Politicians’ Image-Based Political Communication Strategies on Social Media. *The International Journal of Press/Politics*, 26(1), 119–142. <https://doi.org/10.1177/1940161220959553>
- Fernández-Molina, I., & Casani, A. (2023). International Recognition Meets Areas of Limited Statehood: Practices and Effects on Hybrid Actors in Post-2011 Libya. *Journal of Intervention and Statebuilding*, 17(5), 624–645. <https://doi.org/10.1080/17502977.2023.2245960>
- Gayratovna, J. A. (2025). Concept, Types, Genres, and Functions of Cinema Art. *Journal of Multidisciplinary Academic and Practice Studies (JoMAPS)*, 3(4), 325–334.
- Jancsics, D. (2024). Organization and Organizationality of Corruption. *Sociology Compass*, 18(7). <https://doi.org/10.1111/soc4.13254>
- Jayakody, S., Morelli, D., & Oberoi, J. (2023). Political Uncertainty, Corruption, and Corporate Cash Holdings. *Journal of Corporate Finance*, 82, 102447. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2023.102447>
- Kashaka, N. D. (2025). Cinematic Techniques: Shaping Viewer Perception and Emotion. *RESEARCH INVENTION JOURNAL OF CURRENT ISSUES IN ARTS AND MANAGEMENT*, 4(2), 28–33. <https://doi.org/10.59298/RIJCIAM/2025/422833>
- Kennedy, M., Hussain, S., & Cunliffe, M. (2026). Revisiting Goffman’s Impression Management: Doctoral Candidates’ Identity Management Challenges. *Higher Education Research & Development*, 1–17. <https://doi.org/10.1080/07294360.2025.2602485>
- Kim, W., Nazrullaeva, E., Neundorf, A., Northmore-Ball, K., & Tertychnaya, K. (2026). Strategies of Political Control and Regime Survival in Autocracies. *Democratization*, 1–25. <https://doi.org/10.1080/13510347.2025.2611256>
- Kitagawa, R., & Chu, J. A. (2021). The Impact of Political Apologies on Public Opinion. *World Politics*, 73(3), 441–481. <https://doi.org/10.1017/S0043887121000083>
- Kotan, S. (2025). Coding And Signification In Cinema: Semiological Perusal Of The Film In The Shadows. *CINEJ Cinema Journal*, 13(2), 312–358. <https://doi.org/10.5195/cinej.2025.725>
- Koury, M. G. P. (2019). Sobre Erving Goffman e a análise do fracasso em The Presentation of Self in Everyday Life. *Dilemas: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social*, 12(3), 525–540.
- Kudo, Y. (2025). Rewarding Loyalty: Selective Reassurance and Enforcement of Asymmetric Alliances. *Journal of Peace Research*, 62(6), 1938–1950. <https://doi.org/10.1177/00223433241292270>
- Lubis, A. S., & Hidayat, R. (2026). Representasi Dogma Orang Tua dalam Film Ngeri-Ngeri Sedap: Analisis Semiotika Roland Barthes. *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 159–174. <https://doi.org/10.70716/perseptif.v4i2.508>
- Miles, E. W., Schatten, J., & Chapman, E. (2020). How Face Threat Sensitivity Affects Proactive Negotiation Behavior. *Organization Management Journal*, 17(1), 2–14. <https://doi.org/10.1108/OMJ-05-2019-0725>

- Noordzij, K., de Koster, W., & van der Waal, J. (2024). Politicians' High-Status Signals Make Less-Educated Citizens More Supportive of Aggression Against Government: A Video-Vignette Survey Experiment. *The British Journal of Sociology*, 75(4), 500–518. <https://doi.org/10.1111/1468-4446.13099>
- Nunes, E. D. (2021). The Presentation of Self in Everyday Life: Biografia de um Livro. *História, Ciências, Saúde-Manguinhos*, 28(3), 761–774. <https://doi.org/10.1590/s0104-59702021000300008>
- Nur-tegin, K., & Jakee, K. (2020). Does Corruption Grease or Sand the Wheels of Development? New Results Based on Disaggregated Data. *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 75, 19–30. <https://doi.org/10.1016/j.qref.2019.02.001>
- Ortiz-Inostroza, C., & Bargsted, M. (2026). Political Trust and Elite Closure: Evidence from Latin America. *Party Politics*. <https://doi.org/10.7910/DVN/FG5QQB>
- Pizzolitto, E., Verna, I., & Venditti, M. (2023). Authoritarian Leadership Styles and Performance: A Systematic Literature Review and Research Agenda. *Management Review Quarterly*, 73(2), 841–871. <https://doi.org/10.1007/s11301-022-00263-y>
- Pritzlaff-Scheele, T., & Nullmeier, F. (2018). *Relating Face to Face. Communicative Practices and Political Decision-Making in a Changing Media Environment* (pp. 287–311). https://doi.org/10.1007/978-3-319-65584-0_12
- Reinders, F. C. P., Wildschut, T., Haesevoets, T., De keersmaecker, J., Van Assche, J., & Van Lange, P. A. M. (2021). Repairing Trust Between Individuals and Groups: The Effectiveness of Apologies in Interpersonal and Intergroup Contexts. *International Review of Social Psychology*, 34(1). <https://doi.org/10.5334/irsp.479>
- Şahin, A., Şahin, F., & Sezgin, L. (2026). Reconstruction of Identity and Meaning in the Postpartum Period: Women's Experiences of Social Vulnerability and Existential Transition—A Phenomenological Study. *Healthcare*, 14(5), 693. <https://doi.org/10.3390/healthcare14050693>
- Saputra, D., & Saifuddin, A. (2022). *Analisis Semiotika pada Film*. Penerbit Haura Utama.
- Schindler, S. (2024). Post-truth Politics and Neoliberal Competition: The Social Sources of Dogmatic Cynicism. *International Theory*, 16(1), 102–121. <https://doi.org/10.1017/S1752971923000040>
- Smith, J., & Sprung, E. (2026). From Spoiled Identity to Cleft Identity: Parenting, Penal Stigma and Suspended Citizenship. *Social Sciences*, 15(6), 345. <https://doi.org/10.3390/socsci15060345>
- Sullivan, B. (2023). Executive Secrecy: Congress, the People, and the Courts. *Emory Law Jurnal*, 72(5), 1302–1349. <https://scholarlycommons.law.emory.edu/elj/vol72/iss5/6>
- Tang, X., & Li, J. (2024). Toward Integrative Triangulation in Discourse-Historical Approach. *Discourse & Society*. <https://doi.org/10.1177/09579265231215473>
- Wahyuningsih, S. (2019). *Film dan Dakwah: Memahami Representasi Pesan-Pesan Dakwah dalam Film melalui Analisis Semiotik*. Penerbit Media Sahabat Cendekia.
- Zen, S., Ropo, E., & Kupila, P. (2023). Constructing Inclusive Teacher Identity in a Finnish International Teacher Education Programme: Indonesian Teachers' Learning and Post-Graduation Experiences. *Heliyon*, 9(6), e16455. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e16455>
- Zengin, H. (2024). How Does Public Weeping Affect Public Approval Rate of a Politician? *Mediterranean Politics*, 29(2), 260–273. <https://doi.org/10.1080/13629395.2022.2148194>